

PERAN KOMANDO ARMADA III TERHADAP PEREKONOMIAN DI KOTA SORONG

THE ROLE OF KOMANDO ARMADA III TO THE ECONOMY OF SORONG CITY

Lutfia Inggriani¹, A. Octavian², Purnomo Yusgiantoro³

Prodi Ekonomi Pertahanan
Fakultas Manajemen Pertahanan
Universitas Pertahanan
(inggrianyluthfia@gmail.com)

Abstrak – Pengembangan kekuatan di Indonesia saat ini sedang mengalami penyesuaian untuk keperluan penegakan kedaulatan yang mampu menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kehadiran Koarmada III di Kota Sorong sebagai implikasi penegakan kedaulatan di wilayah timur Indonesia memberi implikasi berupa tegaknya kedaulatan, menekan konflik horizontal, menangkalkan ancaman, dan menindak pelanggaran laut sehingga mengurangi kerugian materiil. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang afiliasi dan kerjasama sipil-militer yang memiliki implikasi pada pertumbuhan ekonomi daerah dan perubahan sosial ekonomi melalui berbagai paradigma yang berkembang dengan adanya pembentukan Koarmada III di Kota Sorong. Penelitian menggunakan Soft System Methodology serta dipadukan dengan analisa ekonomi dan teori-teori ekonomi sebagai pisau analisa utama. Software NVivo juga digunakan dalam pengolahan data dengan melakukan koding serta pembentukan kategori tema. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dari sisi konsumsi prajurit belum memberikan kontribusi yang besar, sebab sebagian besar prajurit memiliki kemampuan konsumsi dari prosi gaji yang dimiliki atau marginal propensity to consume (MPC) sebesar 40%. Sedangkan karakter penduduk militer cenderung tidak menetap dalam waktu yang lama sehingga kontribusi tersebut tidak menunjukkan hasil yang signifikan dalam waktu yang singkat. Pola konsumsi di era masyarakat post-industrial seperti di Kota Sorong sebagian besar dipengaruhi oleh gaya hidup, keinginan, budaya lama, budaya masuk karena bertambahnya jumlah penduduk termasuk yang dibawa oleh prajurit militer. Secara umum Koarmada III memiliki peran penting tidak hanya untuk pertahanan, namun juga untuk pengembangan sumber daya manusia, alam, dan ekonomi di Kota Sorong, terutama dalam pengendalian konflik dan ancaman yang berpotensi merugikan daerah.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Sosial Ekonomi, Konsumsi, PDRB, Anggaran Pertahanan, Aktivitas Pertahanan

Astract – The development of TNI forces in Indonesia is currently adjusting according to the need for enforcement of sovereignty which is able to reach the entire territory of the Republic of Indonesia (NKRI). The presence of Koarmada III in Sorong City as an implication of enforcing sovereignty in the eastern region of Indonesia has implications in the form of upholding sovereignty, suppressing horizontal conflict, counteracting threats, and cracking down on sea violations so as to reduce material losses. This study aims to discuss civil-military participation and cooperation which has implications for regional economic growth and economic change through the various paradigms that have developed with the formation of Koarmada III in Sorong City. Using the Soft System Methodology and integrated with economic analysis and economy theories as the main analytical knife. NVivo software is also used in processing data by coding and forming theme categories. The analysis result

¹ Program Studi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan.

² Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

³ Program Studi Ketahanan Energi, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan.

shows that regional economic growth in terms of army consumption has not made a major contribution, because most soldiers have the ability to consume from their salaries or the marginal propensity to consume (MPC) by 40%. While the character of the military population is not satisfied for a long time, it does not need to show significant results in a short time. The consumption pattern in the post-industrial era, society such as in the city of Sorong is largely influenced by lifestyles, desires, old culture, cultural influences because of the increase in population including those carried by military personnel. In general, Koarmada III has an important role not only for defense, but also for humans, nature, and the economy in Sorong City, especially in conflict control and threats that have the potential to harm the region.

Keywords: Economic Growth, Socio-Economic, Consumption, GDP, Defense Budget, Defense Activities

Pendahuluan

Perkembangan lingkungan strategis yang diwarnai dengan pergeseran kekuatan dunia dari bipolar menjadi multipolar berdampak terhadap situasi keamanan yang tidak menentu, berubah sangat cepat dan sulit diprediksi, sehingga secara tidak langsung akan memaksa setiap negara berupaya menjaga stabilitas nasional untuk mengamankan kepentingan nasionalnya. Konflik global yang diterjemahkan sebagai konflik yang melibatkan kekuatan-kekuatan utama di dunia masih terus berlangsung di beberapa kawasan. Spektrum ancaman yang semakin luas seiring dengan meningkatnya intensi ancaman menuntut sebuah negara membangun kekuatan militer dengan berbagai fungsi dan kemampuan. TNI sebagai komponen

utama dalam unsur pertahanan negara memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia sejak sebelum kemerdekaan, proses merebut kemerdekaan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan (NKRI), hingga mengawal jalannya roda pembangunan bangsa Indonesia⁴.

Dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI gelar kekuatan TNI semakin diperkuat tidak hanya di bagian barat Indonesia. Ancaman bisa melalui berbagai batas dimensi dan wilayah, sehingga untuk memperkuat dan mempertahankan kedaulatan NKRI pembangunan armada militer dan penggelaran pasukan akan difokuskan menyeluruh meliputi wilayah terluar di seluruh daratan, lautan dan udara di Indonesia⁵. Penambahan jumlah pasukan

⁴ Supriatna, Agus. 2017. *Pertahanan Nasional dalam Perspektif Ekonomi*. Bandung: UNPAD Press.

⁵ Paparan Panglima TNI Hadi Tjahjanto pada kuliah umum universitas pertahanan. *Kebijakan TNI Dalam Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Wilayah NKRI*. 13 Maret 2018. sumber: catatan penulis dan rekaman perkuliahan

dan penggelaran pasukan akan dilakukan bertahap dan menyeluruh dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

Ancaman laten pada laut di bagian timur Indonesia khususnya Provinsi Papua Barat, sangat beragam dan membutuhkan pengendalian serta pencegahan yang tepat. Berbagai ancaman tersebut sangat beragam diantaranya kerusakan lingkungan, polusi laut diakibatkan tumpahan minyak dan sampah, ilegal fishing, ancaman kedaulatan teritori, konflik horizontal dengan negara yang berbatasan langsung, *illegal logging*, serta perdagangan manusia. Adapun jenis ancaman keamanan maritim menurut TNI AL meliputi penangkapan ikan ilegal, pelanggaran wilayah, penyelundupan barang, kecelakaan laut, bencana alam, perusakan lingkungan laut, dan pembajakan/perompakan di laut⁶.

TNI melakukan penggelaran kekuatan berdasarkan tinjauan strategis termasuk di dalamnya adalah kondisi geografis dan intensitas ancaman yang terjadi. Pembentukan Komando Armada III memiliki alasan kuat sebagaimana yang tercantum dalam naskah akademik

pembentukan Koarmada III sebagai latar belakang pemilihan lokasi di Kota Sorong yakni luasnya bentangan geografis wilayah kerja Komando Armada Timur (Koarmatim) yang saat ini telah berubah menjadi Koarmada II. Wilayah kerja Komando Armada RI Kawasan Timur dari arah barat yaitu perairan perbatasan Kabupaten Cirebon dengan Kabupaten Brebes ke arah Timur sampai dengan Perairan Papua, dari arah Selatan Perairan Pulau Rote sampai dengan ke Utara perairan pulau Sangihe Talaud. Wilayah ini merupakan suatu bentangan medan tugas yang sangat berat jika dihadapkan dengan kondisi alutsista dan keberadaan Markas Komando Armada Timur yang terletak di Surabaya. Hal ini akan memberikan suatu permasalahan apabila di suatu daerah ada terjadi suatu masalah (*trouble spot*) yang membutuhkan pelibatan alutsista TNI AL di jajaran komando Armada RI kawasan Timur dengan segera, karena adanya perbedaan jarak, ruang dan waktu yang sangat jauh.⁷

Sehingga Kota Sorong dipilih menjadi lokasi pembangunan Koarmada III TNI AL untuk menindaklanjuti berbagai risiko ancaman teritori seperti tersebut di

⁶ Ade Supandi, Paparan KASAL pada kuliah umum universitas pertahanan. *Peran TNI AL Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Maritim*. 15 mei 2018. h.10

⁷ TNI AL Komando Armada RI Kawasan Timur: Naskah Akademik Tentang Pembentukan Koarmada III di Sorong. Tahun 2018

atas. Selain itu, konsep gelar pangkalan TNI Angkatan Laut, di mana gelar kekuatan diarahkan di daerah-daerah perbatasan dan rawan konflik, dalam hal ini banyak terjadi di Papua, dan Kota Sorong dinilai sebagai lokasi strategis. Dalam konteks ini, Wilayah Papua yang berbatasan langsung dengan Negara Palau, Australia dan Papua Nugini, memerlukan peningkatan kemampuan Pangkalan TNI Angkatan Laut untuk menciptakan keamanan perairan perbatasan. Perairan Sorong pun berdekatan dengan keberadaan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III, merupakan salah satu alur pelayaran internasional yang memiliki potensi kerawanan tinggi terhadap kemungkinan terjadinya berbagai gangguan keamanan di laut yang merugikan secara ekonomi, sehingga perlu pengawasan maksimal, terus menerus dan intensif.

Upaya penggelaran kekuatan TNI saat ini tidak lagi berpusat pada pulau Jawa, berdasarkan rencana strategis dalam pembangunan kekuatan yang meliputi seluruh wilayah kepulauan di Indonesia, TNI AL memiliki rancang bangun penggelaran pasukan dengan

membagi rata pangkalan induk di tiga wilayah utama Indonesia. Pembentukan kekuatan melalui pembangunan Komando Armada (Koarmada) Angkatan Laut yang semula hanya memiliki dua pusat di pulau Jawa sebagai Koarmada Barat dan timur (Koarmabar dan Koarmatim) kini merujuk pada Keputusan Presiden nomor 12 Tahun 2018, dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, perlu membangun pertahanan negara yang kuat dan merata yang dapat menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)⁸. TNI AL membangun Koarmada III di Kota Sorong sebagai basis militer, penggelaran kekuatan, dan sebagai garda terdepan pengamanan teritori laut NKRI di bagian timur. Dalam hal pembentukan keamanan, peran TNI AL sebagai integral dari TNI tidak hanya seputar pertahanan nasional, namun juga berperan aktif dalam melaksanakan pengawasan wilayah NKRI dengan menjaga wilayah perbatasan dan pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan.

Ilmu pertahanan dan ilmu ekonomi memiliki keterkaitan pada pembangunan

⁸ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Divisi Infanteri 3 Komando Cadangan Strategis TNI AD, Komando Armada III TNI AL, Komando

Operasi TNI AU III, dan Pasukan Marinir 3. (pangkalan militer tersebut populer diketahui sebagai Divisi Infanteri 3 Kostrad, Koops AU III, Koarmada III, dan Pasmar 3)

dan pengembangan masing-masing bidang. Pertahanan suatu negara dapat tercapai dengan baik jika terdapat fundamental ekonomi yang kuat. Sistem pertahanan nasional bukan hanya butuh kehadiran militer yang kuat, namun juga kekuatan ekonomi yang kokoh. TNI sebagai salah satu pemegang kepentingan (*stakeholders*) penting dalam pembangunan diharapkan menjadi penggerak dan inovator dalam mendorong masyarakat terutama di wilayah pedesaan dan wilayah perbatasan agar lebih cepat berkembang. Proses peran TNI sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian lokal dapat terlihat sejak sebelum, ketika, dan setelah terbentuknya pangkalan militer. Peran TNI pada proses tersebut terbagi menjadi peran langsung dan tidak langsung pada perekonomian suatu wilayah yang menerima manfaat dari pembangunan pangkalan militer. Peran ini yang diharapkan akan menjadi stimulus perekonomian di Kota Sorong.

Sebelum adanya berbagai pembangunan di Kota Sorong, kondisi perekonomian cenderung mengalami stagnansi. Dalam jangka waktu lima tahun terakhir seperti yang di lansir oleh portal

berita lensaPapua, Kota Sorong mengalami perubahan yang sangat signifikan akibat berbagai pembangunan, diantaranya pembangunan jalan, pembangunan pusat perbelanjaan, pembangunan bandara (kini naik status menjadi bandara internasional), dan bertambahnya pangkalan-pangkalan militer besar di Kota Sorong. Pembangunan-pembangunan tersebut akan meningkatkan minat para investor untuk melakukan investasi langsung. Saat ini banyak bank besar domestik maupun internasional sudah membangun kantor cabang, sehingga hal ini dapat dijadikan indikator tumbuhnya sektor keuangan di Kota Sorong⁹. Kota Sorong dipilih untuk menjadi basis pangkalan Koarmada III TNI AL merujuk pada pertimbangan bahwa kedepannya pelabuhan Sorong akan dikembangkan menjadi salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia, sebagai bagian dari jalur utama tol laut yang akan menjadi salah satu pusat distribusi logistik dan perdagangan di wilayah timur. Kondisi ini akan membantu bagi peningkatan perputaran bisnis di daerah mengingat jalur perairan di Sorong adalah jalur yang paling ramai sebagai lintasan domestik dan internasional, namun

⁹ <https://www.lensapapua.com>. Pembangunan Perputaran Ekonomi Kota Sorong Tercepat se-

Papua Barat. (Diakses pada tanggal 10 september 2018)

seiring dengan hal tersebut juga membawa dampak ancaman teritori seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Pada siklus keuangan negara, pengeluaran di bidang militer termasuk dalam pengeluaran yang tinggi. Pengeluaran negara termasuk di dalamnya pengeluaran rumah tangga, investasi, dan pengeluaran pemerintah merupakan unsur pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) dari sisi konsumsi. Berbagai jenis pengeluaran pemerintah termasuk *military expenditure* (pengeluaran bidang militer) adalah bagian terbesar dari beban anggaran tiap tahunnya karena memiliki karakter berbeda dengan pengeluaran lain. Pada beberapa negara, pengeluaran pemerintah di bidang militer disebut sebagai *defense spending* (pengeluaran bidang pertahanan) yang meliputi militer, sipil, dan pengeluaran apapun yang memiliki afiliasi dengan kegiatan bidang pertahanan¹⁰. pengeluaran tersebut akan memicu pola konsumsi pada sektor lainnya juga mampu menjadi stimulus peningkatan daya beli bagi individu lainnya.

Pembangunan pangkalan militer menjadi efek pengganda (*multiplier effect*) pada penerimaan negara dan berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB). Teori antara pengeluaran pemerintah di bidang pertahanan dan relevansinya dengan PDB sudah ada sejak lama. Menurut data *World Bank* sejak tahun 1960 hingga 2017 beban pengeluaran pemerintah dari sektor pertahanan semakin menurun. Jika ditelaah lebih mendalam, persentase *military expenditure* terhadap PDB ada kaitannya dengan kondisi perang pada masa tertentu.

Pada grafik diatas bukan berarti dengan tidak adanya perang maka PDB suatu negara juga ikut menurun. Di atas adalah sebuah penggambaran secara umum kondisi negara yang tergabung pada NATO, mencakup semua pengeluaran saat ini dan modal pada angkatan bersenjata, termasuk pasukan perdamaian UN, kementerian pertahanan, lembaga pemerintah lainnya yang terlibat dalam proyek pertahanan, pasukan paramiliter jika mereka dilatih dan dipersenjatai untuk operasi militer, serta kegiatan ruang militer lain.

¹⁰ Tibaldi, Edinaldo. 2014. *The Economic Impact of The Rhode Island Defense Sector*. Bryant University, U.S.A. h.3

Pengeluaran tersebut termasuk di dalamnya yaitu, personil militer dan sipil; uang pensiun personil militer dan layanan sosial untuk personil; operasi dan pemeliharaan; pembelian; penelitian dan pengembangan militer; dan bantuan militer (dalam pengeluaran militer negara donor). Pengeluaran tersebut mengecualikan pertahanan sipil dan pengeluaran saat ini untuk kegiatan militer sebelumnya, seperti untuk tunjangan veteran, demobilisasi, konversi, dan penghancuran senjata. Definisi ini tidak dapat diterapkan untuk semua negara, karena itu akan memerlukan informasi yang jauh lebih rinci daripada data yang tersedia tentang apa yang termasuk dalam anggaran militer dan item pengeluaran militer di luar anggaran. (Misalnya, anggaran militer mungkin atau mungkin tidak mencakup pertahanan sipil, cadangan dan pasukan tambahan, polisi dan pasukan paramiliter, kekuatan dua tujuan seperti polisi militer dan sipil, hibah militer dalam bentuk barang, pensiun untuk personil militer, dan kontribusi jaminan sosial dibayarkan oleh satu bagian dari pemerintah ke yang lain.)¹¹

Sebuah negara yang melakukan pengeluaran dengan besaran tertentu pada sektor pertahanan akan turut berkontribusi terhadap pemasukan di sektor lain, atau dapat dikatakan sebuah output belanja pertahanan akan menjadi input ada sektor lain misalnya pada sektor industri persenjataan, industri logistik, industri infrastruktur, dan industri-industri lain di sembilan sektor perekonomian. Dibalik apa yang terlihat, dampak tidak langsung yang ditimbulkan oleh pengeluaran pemerintah bidang pertahanan adalah terjadinya hubungan mutualisme antara sektor pertahanan dan sektor perekonomian setempat melalui angka pengganda yang dihasilkan. Sehingga dapat diartikan bahwa persentase seperti yang tertera pada gambar menurun bukan karena sedikitnya belanja bidang pertahanan atau ketiadaan perang, namun juga karena meningkatnya kondisi perekonomian di suatu negara secara agregat pada kurun waktu tertentu. Pada proses penggelaran pasukan secara menyeluruh akan memberikan dampak peningkatan transaksi perdagangan baik dari perdagangan barang dan jasa. Dari

¹¹ <https://data.worldbank.org/indicator/> - *Military expenditure (% of GDP)*. mengutip dari: Stockholm International Peace Research

Institute (SIPRI), *Yearbook: Armaments* (diakses tanggal 13 agustus 2018)

peningkatan volume tersebut akan berdampak pada peningkatan perputaran uang, barang dan jasa di suatu daerah sehingga penerimaan daerah meningkat dan aliran dana akibat dari transaksi tersebut dapat dirasakan masyarakat sekitar. Pembangunan kekuatan TNI yang menyeluruh tidak hanya melibatkan peran TNI saja, namun lebih dari itu, setiap sektor industri turut berperan sesuai bidangnya untuk membentuk suatu pola hubungan kerja sama yang komprehensif.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menjelaskan perubahan-perubahan bidang perekonomian sebagai implikasi dari pembangunan Koarmada III TNI AL serta peran *stakeholder* terkait yang bekerja dalam proses relokasi kekuatan TNI di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Kajian ini akan menghasilkan analisa kebijakan yang memuat unsur ekonomi dalam pertimbangan pembuatan strategi pertahanan kedepannya. Pada akhirnya, pertahanan negara sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara dan mencapai salah satu kepentingan nasional, pada perspektif ekonomi adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif eksplanatori dengan pola berpikir induktif-deduktif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mencari tau makna tertentu dari fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari partisipan. Peneliti berusaha menyelidiki isu yang berhubungan dengan peran *stakeholder* dan Koarmada III pada kondisi perekonomian ketika adanya pembangunan pangkalan militer di Kota Sorong. Untuk meneliti isu-isu ini, penggalan informasi dikumpulkan dari berbagai individu sebagai narasumber kunci dengan pendekatan eksplanatori.

Proses induktif mengilustrasikan usaha peneliti dalam mengolah tema dan data secara keseluruhan dan berulang-ulang hingga peneliti mampu membangun serangkaian tema yang utuh. Pola berpikir deduktif berawal dari pemikiran umum kemudian ke arah yang lebih khusus. Dengan analisa deduktif peneliti melihat kembali data dari tema untuk menentukan apakah lebih banyak bukti dapat mendukung tema dan apakah perlu menggabungkan informasi

tambahan¹². Sedangkan analisa eksplanatori untuk dapat menjelaskan kondisi sosial yang terjadi karena kegiatan ekonomi, menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi empirik yang terjadi sesuai apa adanya di Kota Sorong karena adanya pembangunan Koarmada III.

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data dengan menggunakan menggunakan *soft system methodology* (SSM) dan melakukan analisa melalui perhitungan ekonomi. Perhitungan ekonomi berfungsi untuk mendeskripsikan dan memberi gambaran pada objek yang diteliti terhadap kondisi perekonomian. Sedangkan *soft system methodology* (SSM) akan membantu menemukan pola pada persoalan dan pembahasan dengan pendekatan kualitatif.

Pembahasan

Perencanaan anggaran militer erat kaitannya dengan pengeluaran pemerintah pada bidang pertahanan yang secara umum dapat mempengaruhi besaran persentase capaian ideal belanja pada APBN di bidang pertahanan.

Perencanaan anggaran sangat perlu untuk mencapai standar Minimum Essential Forces (MEF) guna meningkatkan daya gentar TNI dan mengoptimalkan fungsi pertahanan yang mampu meliputi seluruh wilayah geografis Indonesia. Peran TNI AL sebagai integral dari kekuatan TNI menjadi perhatian sebab pemilihan lokasi di wilayah timur Indonesia memiliki kondisi perekonomian yang berbeda, dapat dikatakan cenderung lambat. Dengan kehadiran kekuatan baru bersekala besar dari TNI AL diharapkan dapat memberi efek berkelanjutan terhadap perekonomian setempat, pengendalian ancaman, dan perubahan struktur sosial menjadi lebih baik. Dampak ekonomi dengan adanya pembangunan pangkalan militer Koarmada III di Kota Sorong adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Ekonomi dan Trade-off Anggaran Pertahanan

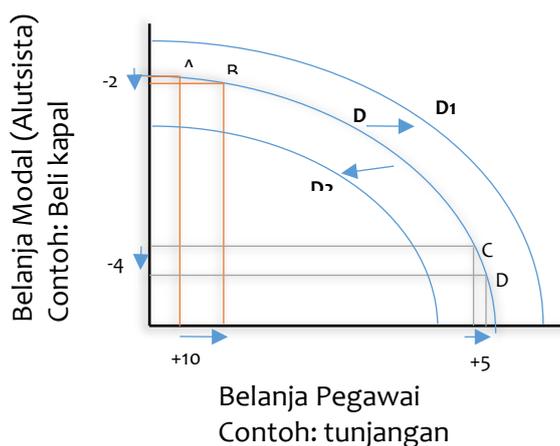
Pada masa MEF kedua, Kementerian Pertahanan mencatat pertumbuhan kontribusi anggaran pertahanan terhadap PDB mengalami peningkatan dan penurunan tidak

¹² Creswell. 2016. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Remaja. Hlm. 248

signifikan, hal ini menandakan bahwa pengeluaran pertahanan memiliki kontrol yang baik dalam pelaksanaan belanjanya dengan model penganggaran yang proporsional, meskipun *trade-off* terkadang sering terjadi dan selalu diiringi dengan adanya biaya peluang (*opportunity cost*¹³).

Anggaran pertahanan didominasi oleh belanja pegawai, alasan belanja pegawai cenderung lebih besar daripada belanja modal dan barang adalah karena pertimbangan gelar kekuatan militer untuk memenuhi kebutuhan gaji prajurit dan sipil yang bekerja di bidang pertahanan. Pengaturan alokasi anggaran yang terbatas dengan kebutuhan yang semakin berkembang

dan membutuhkan biaya yang besar menjadikan *trade-off* tersendiri dari pembuat kebijakan untuk memilih alokasi anggaran seperti ilustrasi mentega dan senjata. Dihadapkan oleh kondisi komposisi belanja pegawai seperti di atas memberi gambaran pengeluaran kekuatan militer harus memilih antara membelanjakan anggaran untuk keperluan alutsista dengan implikasi kesejahteraan prajurit dan pegawai harus turun atau setidaknya stagnan, atau memilih membelanjakan anggaran untuk kebutuhan gaji prajurit dan pegawai guna mempersiapkan kemandirian prajurit dan pegawai yang siap ditugaskan di berbagai wilayah dengan kondisi perekonomian dan sosial yang berbeda-beda namun



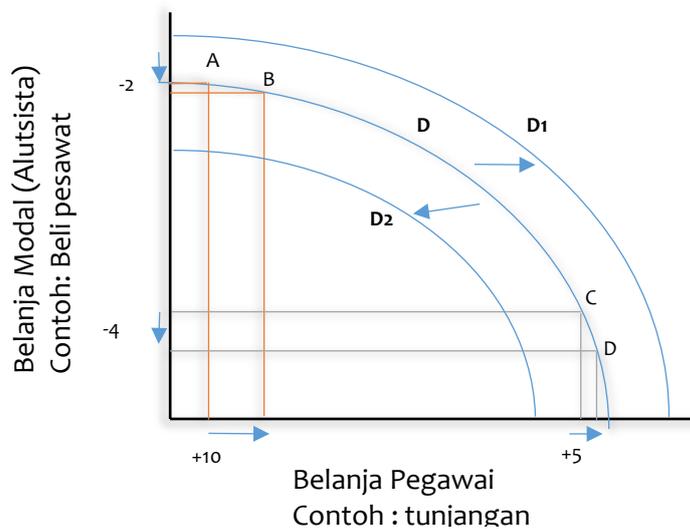
Gambar 1. Kurva Production Possibility Frontier (PPF)
 Sumber: Parkin – Ekonomi Mikro dan olahan peneliti

¹³ *Opportunity cost* adalah biaya peluang dari satu tindakan merupakan hilangnya alternatif yang paling bernilai

dengan implikasi minimnya biaya belanja modal untuk pembelian alutsista yang memperkuat fungsi pertahanan.

Ketika sebuah keputusan rasional penentu kebijakan anggaran memilih harus meningkatkan anggaran pertahanan, di sisi lain juga membutuhkan alokasi anggaran untuk sektor lain dalam susunan APBN misalnya untuk kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan. Dalam sudut pandang ekonomi pertahanan, para ekonom sering menggunakan istilah “senjata” dan “mentega” daripada barang publik dan barang privat¹⁴. Militer sebagai instansi

yang bergerak di sektor pertahanan tidak memiliki hasil produksi berupa barang, namun jasa pertahanan memberikan hasil berupa kedaulatan, keamanan, dan kestabilan nasional, implikasi nyata adalah rasa aman yang diterima oleh seluruh warga Negara yang disebut sebagai barang publik. Sedangkan dalam pilihan untuk memenuhi kesejahteraan atau produksi barang dan jasa lain dapat disebut dengan barang privat. Jika diilustrasikan, bentuk kurva *Production Possibility Frontier* (PPF) antara pilihan menambah atau mengurangi belanja



Gambar 2. Kurva Production Possibility Frontier (PPF)
 Sumber: Parkin – Ekonomi Mikro dan olahan peneliti, 2004

¹⁴ Pocher, Herald. Defence Economics As Part Of The Scientific Works Of Early Economist. Journal VIII Evfolyam 2. Szam. – 2013. Junius.

modal dan belanja pegawai dapat dilihat pada Gambar 2.

Pada grafik di atas mengilustrasikan untuk meningkatkan tunjangan misalnya 10 ribu pasukan lagi (A ke B), hanya membutuhkan 2 kapal sebagai perbandingan biaya peluang. Akan tetapi, bila ingin menambahkan lagi tunjangan 5 ribu pasukan lagi (dari C ke D), biaya peluangnya jauh lebih besar yaitu 4 kapal. Pergeseran kurva batas kemungkinan produksi (dalam penelitian ini dimisalkan sebagai alokasi anggaran) ke luar atau ke dalam. Pergeseran kurva PPF ke luar (D ke D₁) menandakan bahwa kedua anggaran dapat ditambah lebih banyak. Sebaliknya pergerakan ke dalam (D ke D₂) menandakan kedua anggaran tidak dapat ditambah seperti sedia kala, atau mengalami penurunan. Ketika kurva PPF ini bergeser keluar, mengindikasikan pertumbuhan ekonomi, sedangkan jika bergeser ke dalam mengindikasikan pelambatan (resesi) ekonomi.

Kemampuan pertahanan memiliki relasi yang kuat terhadap kekuatan ekonomi nasional, untuk memperkuat kemampuan militer baik personel dan alutsista tentu sebuah negara memerlukan sejumlah anggaran untuk mewujudkan hal tersebut sebagai upaya memperkuat daya gentar (*deterrence*

effect). Kondisi ini pula yang dialami dalam pembangunan Koarmada III di Sorong, di satu sisi TNI AL ingin meningkatkan daya gentar dari penambahan alutsista yang tentu saja membutuhkan biaya besar, di sisi lain pembentukan Koarmada III juga perlu memobilisasi ribuan pasukan ke Sorong dan juga sama-sama membutuhkan biaya besar. *Trade-off* ini memang menjadi polemik bagi sebagian besar militer di dunia, namun bukan berarti tidak ada cara mengatasi atau meminimalisir *trade-off* yang terjadi. Masalah klasik ekonomi adalah seberapa banyak sumber daya yang tersedia harus dikhususkan untuk produksi publik dan berapa banyak untuk barang pribadi.

Dampak Aktivitas Pertahanan Koarmada III Pada Perubahan Sosial Ekonomi Di Kota Sorong

Pengembangan organisasi TNI AL untuk kebutuhan pertahanan di Indonesia bagian timur semakin meningkatkan permintaan terhadap relokasi personel TNI AL dan Alutsista. Seiring dengan kebutuhan pengeluaran kekuatan yang sesuai dengan perubahan ancaman, tinjauan besaran kekuatan TNI AL tidak hanya ditinjau dari anggaran pertahanan saja, melainkan ketersediaan

sumber daya manusia dan ketersediaan alutsista penunjang operasi dalam rangka melakukan pengamanan di wilayah kerja Koarmada III.

Perubahan Ekonomi Pada Sisi Konsumsi Terhadap PDRB

Peran Koarmada III terhadap perekonomian daerah belum dapat dirasakan dalam waktu dekat, namun cukup memberi gambaran mengapa suatu pangkalan militer atau kegiatan pertahanan memberikan dampak pada perubahan sosial ekonomi di wilayah tertentu. Alasan tersebut melalui beberapa analisa dari beberapa faktor diantaranya: pertama, pasukan militer tidak secara permanen berada di wilayah tersebut dan oleh karena itu cenderung menghabiskan / membelanjakan gaji dengan proporsi yang lebih rendah; kedua, beberapa konsumsi militer kebanyakan bersifat internal ke pangkalan dan lebih terikat dengan rantai pasok militer internal daripada rantai pasok dengan ekonomi regional. Kondisi-kondisi tersebut akan terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan turut mengubah pola interaksi sosial yang terjadi. Pertumbuhan penduduk dari sektor pertahanan memiliki peran yang cukup penting tetapi belum cukup

mengubah perekonomian secara signifikan. Seperti yang tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Kontribusi Konsumsi Rumaah Tangga Prajurit di Lingkungan Koarmada III Terhadap PDRB

Klasifikasi Gaji	Total
*DSP ARMADA III	967
Gaji Pokok	11633613,4
Tunjangan	16199667
Total penerimaan	27833280,4
Total penerimaan setahun	79601355815
MPC 0.4%	31.840.542.326
PDRB Konsumsi RT menurut harga konstan 2018	4.596.027.000.001
Kontribusi Gaji Pesonel terhadap PDRB	0,69%

Sumber: Data Personel Mabes AL, BPS Kota Sorong, dan Olahan

Total personel saat ini di kalangan Koarmada III yang terdiri dari Koarmada III, Guspurla Armada III, Guskamla Armada III, dan Lantamal XIV, sebanyak 967 orang dengan konsumsi MPC 40% memberikan kontribusi jumlah konsumsi dalam satu tahun sebesar 31.840.542.326 atau 31,8 milyar rupiah dari total PDRB konsumsi rumah tangga seluruh Kota Sorong sebesar 4.596.027.000.001 atau sekitar 4,5 triliun per tahun, yang artinya hanya memiliki kontribusi 0,69% dari PDRB. Komando Armada III saat ini menargetkan penambahan jumlah pasukan sebesar 3.623 orang khusus Mako Armada III yang proses pemenuhan

tahap pertama ini dilaksanakan sejak Agustus 2018 sampai dengan Desember 2019. Pada kenyataannya target yang mampu dipenuhi hingga Desember 2018 dari target sekitar tiga ribu orang tersebut hanya mampu dicapai sekitar 5% yaitu 178 orang dari total Daftar Susunan Personel (DSP). Dengan kondisi personel yang belum mencapai target, saat ini hanya berkontribusi sebesar 0,02% terhadap PDRB konsumsi rumah tangga dengan jumlah sebesar 7,4 milyar rupiah.

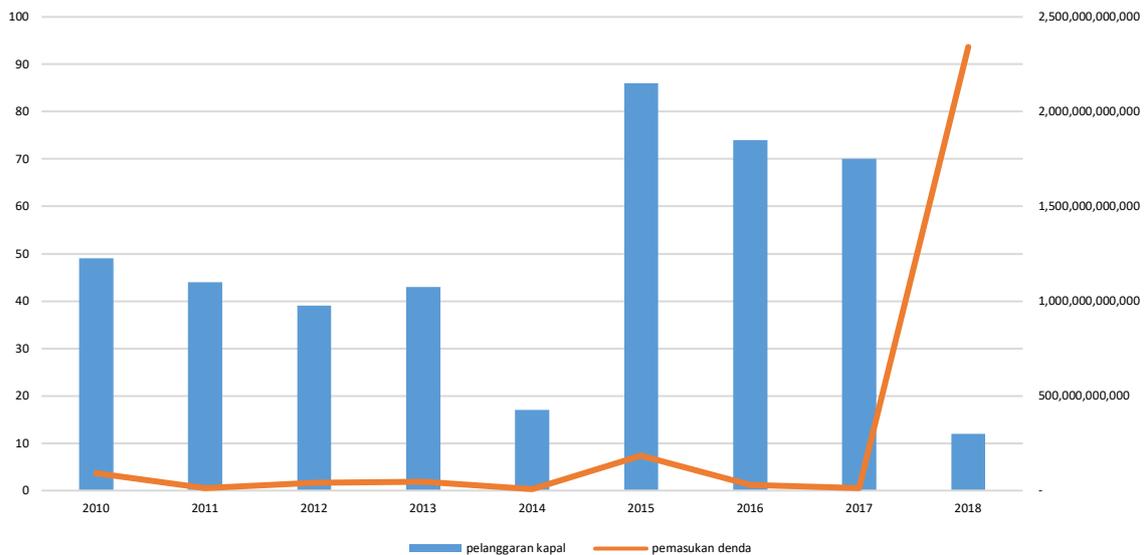
Angka tersebut belum memberikan gambaran kuatnya kontribusi aktivitas pertahanan dengan kinerja ekonomi di suatu daerah yang dapat dipandang melalui dua perspektif: pertama, dari perspektif lokal akan berguna untuk menentukan sejauh mana kinerja ekonomi lokal bergantung pada kegiatan pertahanan di wilayah tersebut, di berbagai Negara kegiatan pertahanan cenderung menjadi komponen penting dari ekonomi lokal; kedua, mengukur dampak dari kegiatan pertahanan sangat penting ketika pembuat kebijakan sedang mempertimbangkan penyesuaian strategi pertahanan nasional.

Sektor pertahanan di Kota Sorong baru akan berkembang dan belum memiliki dampak nyata pada perubahan ini, mengacu pada naskah Rencana

Strategis Komando Armada III (Renstra Koarmada III) rencana DSP hingga tahun 2024 ditargetkan sebanyak 26.981 orang dengan asumsi realisasi sebesar 18.585 orang yang artinya asumsi realisasi melihat perkembangan situasi dan kondisi internal dan eksternal memungkinkan TNI AL untuk memenuhi DSP 69% dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Target DSP tersebut dipenuhi dengan metode pengerahan pasukan secara berkala.

Hal penting yang mendasari analisa perubahan sosial ekonomi pada suatu wilayah adalah perilaku individu ketika melakukan kegiatan konsumsi sehari-hari dan berinteraksi sosial dengan masyarakat di wilayah tersebut. Terlebih lagi dengan banyaknya jumlah personel TNI AL dan beragam asalwilayah personel tersebut akan memberikan pengaruh pada bahasa, budaya, pengembangan informasi, perilaku, kosa kata, dan perubahan lain di struktur sosial masyarakat. Melalui asumsi capaian DSP tersebut diilustrasikan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi rumah tangga dengan tahapan berkala setiap tahunnya mobilisasi personel sebesar 25% dalam kurun waktu lima tahun sejak 2020-2024 dengan mobilisasi pasukan pertahunnya kurang lebih 3.717 orang, artinya ini merupakan strategi pemindahan

Diagram Pelanggaran Kapal dan Potensi Keuntungan/Kerugian



Gambar 3. Diagram Tindakan atas Pelanggaran Kapal dan Potensi Keuntungan/Kerugian finansial

Sumber: Puskodal & olahan peneliti

kekuatan bertahap secara proporsional. Dengan demikian, asumsi pertumbuhan ekonomi masih dapat dikatakan stagnan seperti riwayat pada tahap pertama Koarmada 3 sejak Agustus 2018 sampai dengan Desember 2019 yang berkisar 3.623 personel, dengan kontribusi di bawah 1% dari PDRB konsumsi rumah tangga.

Aktivitas Pertahanan dan Perubahan Sosial Masyarakat

Peran TNI AL dalam menjalankan fungsi dan tugas untuk mengamankan wilayah dan meredam konflik bersenjata sangat didukung dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, salah satunya peran dalam penindakan pelanggaran laut. Tercatat sejak tahun 2010 sampai 2014 dengan

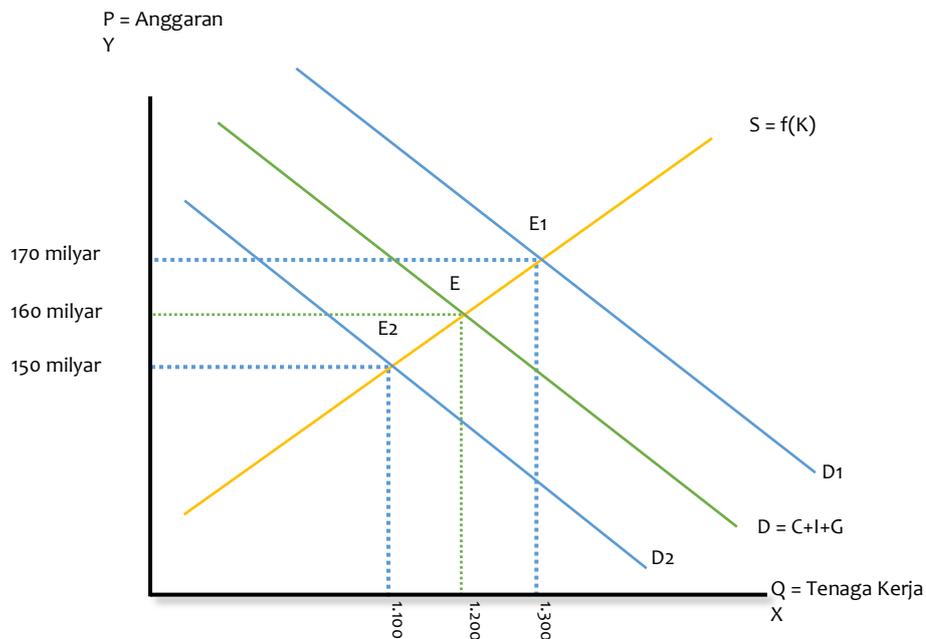
unit-unit kecil organisasi TNI AL yang pada masa tersebut masih menjadi bagian dari Koarmada Barat (saat ini Koarmada II) telah mampu menjalankan fungsi sebagai penjaga kedaulatan dari bocornya ancaman yang masuk, tercatat capaian tindakan pada pelanggaran laut saat itu sebesar 434 jenis pelanggaran. Dari tindakan dan poses hukum yang dilakukan melalui koordinasi TNI AL, kepolisian, KKP, dan pemerintah pusat, mampu menghindari potensi kerugian 2,7 triliun rupiah. Peran pengendalian konflik dan ancaman ini dapat dirasakan langsung dengan mengetahui melalui pemberitaan-pemberitaan media. Berikut diagram yang menunjukkan peran TNI AL dalam pengendalian dan penanganan pelanggaran laut di wilayah kerja Koarmada III dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 menunjukkan keterkaitan antara adanya peran TNI AL dalam melakukan patroli laut yang ditingkatkan dapat menindak pelanggaran lebih banyak dengan pemasukan denda yang juga banyak. Tampak pada tahun 2010-2014 ketika belum ada Koarmada III dan masih menjadi bagian Koarmabar, pengendalian dan penindakan pelanggaran laut stabil dan terkendali, terjadi penurunan pada tahun 2014 yang bisa saja mengindikasikan mulai berkurangnya pelanggaran laut karena pelayaran yang berkurang atau dipengaruhi isu-isu kemanan, politik, dan pertahanan yang saat itu berkembang. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami peningkatan kemudian menurun drastis pada tahun 2018, yang bertepatan saat itu di tahun 2015 Lantamal IV baru terbentuk, artinya penambahan kekuatan menyesuaikan standar kelas lantamal menjadikan fungsi operasi di laut semakin baik sehingga penindakan pelanggaran laut dapat dimaksimalkan. Pada tahun 2018 dengan adanya Koarmada III berarti kekuatan TNI AL di wilayah timur akan meningkatkan keamanan wilayah ALKI III. Dengan riwayat pada 2015 sudah terbentuk *deterrence effect* bagi kapal-kapal yang bisa melakukan pelanggaran menjadikannya efek jera ditambah dengan adanya kebijakan penindakan langsung dengan menenggelamkan kapal oleh

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat menurunkan tingkat pelanggaran dan meningkatkan potensi keuntungan finansial pada Negara maupun Kota Sorong.

Peran Koarmada III, Pemerintah Daerah, dan Swasta Pada Perekonomian Kota Sorong

Pola hubungan kerjasama antara sipil-militer ini akan terus ada sampai kapanpun, sektor pertahanan akan mengembangkan kekuatan, sementara itu sektor sipil akan menawarkan barang/jasa penunjang pengembangan kekuatan, dan pemerintah sebagai regulator akan melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi dari pola hubungan kerjasama yang terbentuk. Secara komprehensif semua hal ini tidak lepas dari adanya permintaan dan penawaran sebagai konsumen dan produsen. TNI AL dalam hal ini Koarmada III sebagai konsumen barang dan jasa bagi produsen yaitu perusahaan swasta. Koarmada III akan membuka kesempatan penyerapan tenaga kerja akibat adanya permintaan dan anggaran pertahanan sebagai faktor produksi. Pada sisi lain sektor swasta sebagai produsen akan



Gambar 4. Kurva permintaan dan penawaran
 Sumber: Mankiw dan olahan peneliti, 2009

meningkatkan penawaran dalam bentuk barang dan jasa untuk membangun koarmada III.

Anggaran pertahanan memiliki hubungan terhadap permintaan dan penawaran barang/jasa pada pembangunan Koarmada III. Kurva Demand (D) dengan sumbu E menunjukkan jika anggaran pembangunan sebesar 160 milyar rupiah maka supply (S) dari produsen akan sebesar 1.200 pekerja menyesuaikan Y konsumsi. Pada ekuilibrium ini menggunakan asumsi *ceteris paribus*¹⁵ yang menganggap keadaan lain tidak mempengaruhi besar kecilnya

permintaan barang yaitu harga-harga tetap sabil, inflasi tidak mengalami perubahan, dan besaran anggaran tidak berubah, maka permintaan akan tetap sama. Sedangkan pergeseran kurva D ke kanan (E ke E1) disebabkan perubahan faktor dalam hal ini adalah anggaran yang bertambah sehingga tenaga kerja yang ditawarkan untuk mengerjakan pembangunan Koarmada III dapat ditingkatkan. Sedangkan jika kurva D bergeser ke kiri (E ke E2) menandakan berkurangnya anggaran untuk membiayai pembangunan Koarmada III sehingga tenaga kerja yang dapat ditawarkan berkurang. Prinsip pergeseran kurva D

¹⁵ Ceteris Paribus, yaitu keadaan lain dianggap tetap sehingga tidak mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan barang, seperti barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan, pendapatan rumah tangga,

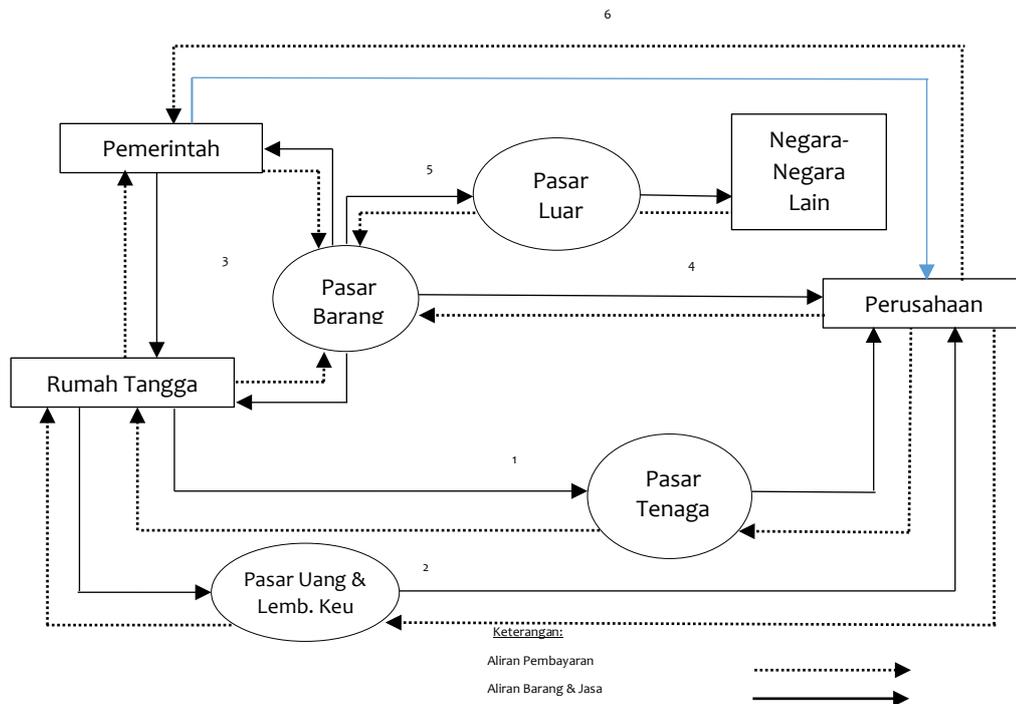
pendapatan rata-rata masyarakat, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat, jumlah penduduk, dan ramalan keadaan di masa yang akan datang.

diantaranya adalah pendapatan, harga barang yang terkait (bisa dalam bentuk barang substitusi atau komplemen), ekspektasi, dan selera. Kondisi pergerakan dan pergeseran kurva ini disebut dengan *move along the supply curve* dan *shifting the demand curve*, prinsip pergerakan diantara kurva penawaran/permintaan ketika semua faktor mempengaruhi penawaran dan permintaan konstan dan hanya berubah pada tingkat harga, sedangkan prinsip pergeseran kurva dikarenakan perubahan pada faktor diluar lain tetap.

Unsur penggeser kurva *demand* di atas ditinjau dari faktor pendapatan disesuaikan dengan konten penelitian ini adalah pendapatan anggaran TNI AL bersumber dari APBN. Dengan bertambah atau berkurangnya anggaran maka permintaan terhadap barang/jasa bidang konstruksi untuk memenuhi target pembangunan Koarmada III akan menyesuaikan besaran anggaran tersebut. Sedangkan harga barang terkait yang dimaksud adalah barang/jasa substitusi atau komplemen, dalam hal ini adalah pemerintah akan memilih jika anggaran pertahanan tersedia dalam jumlah tertentu namun tidak dapat menjangkau barang/jasa dari industri swasta, maka substitusi penyedia

barang/jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi pengganti pilihan tersebut. Artinya jika tarif (harga) industri swasta penyedia barang/jasa bidang konstruksi meningkat, maka pilihan menggunakan BUMN. Penyedia barang/jasa bidang konstruksi akan meningkat.

Peningkatan anggaran untuk pembangunan Koarmada III di Sorong akan menyebabkan perubahan dan permintaan barang dan jasa dari industri dan rumah tangga. Ditinjau dari perubahan yang terjadi pada sektor rumah tangga, secara rasional akan memberikan peluang penambahan nilai terhadap berbagai faktor produksi yang dimiliki rumah tangga contohnya tanah. Kondisi sosial masyarakat Sorong yang masih sangat kental memegang aturan adat masih menjunjung tinggi kepemilikan lahan berdasarkan garis keturunan, kondisi tersebut telah banyak berubah dalam kurun waktu lima tahun terakhir sejak semakin banyaknya manusia yang masuk ke Sorong. Faktor ekspektasi masyarakat terhadap peningkatan nilai jual tanah menjadikan hukum adat lebih lunak dikarenakan keputusan rasional perilaku ekonomis untuk mengharapkan balas jasa faktor produksi berupa uang sewa atau harga



Gambar 5. Diagram Interaksi Antar Pelaku Ekonomi (circular flow diagram)
 Sumber: Ekonomi Makro 2, Mankiew, 2009

tanah yang tinggi. Kegiatan ini disebut sebagai interaksi pelaku ekonomi.

Rumah tangga atau masyarakat Kota Sorong menjual SDM yang dimilikinya kepada perusahaan, dalam hal ini adalah industri swasta jasa konstruksi dan industri lainnya yang ada di Kota Sorong. Dari interaksi antara rumah tangga dan perusahaan dipertemukan pada Pasar tenaga kerja. Kemudian dari penjualan jasa SDM tersebut, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah dan profit (sirkulasi nomor 1). Timbal balik berupa balas jasa tersebut akan meningkatkan pendapatan rumah tangga, yang berdampak pada peningkatan kemampuan konsumsi, kemampuan *saving*, dan kemampuan investasi, serta

mengurangi pengangguran dan ketimpangan sosial dengan penyerapan tenaga kerja pada pasar tenaga kerja.

Ketika kemampuan melakukan kegiatan ekonomi meningkat dengan kemampuan investasi dan kemampuan menabung yang baik, akan menciptakan pasar finansial di Kota Sorong. Pasar finansial yang dimaksud adalah tumbuhnya lembaga-lembaga keuangan berupa Bank swasta, Bank negara, lembaga *leasing*, dan koperasi. Peningkatan pendapatan atau *personal income* (PI) pada masyarakat sorong dan cenderung mengubah perilaku konsumsi meningkat diiringi dengan selera yang meningkat, pada kasus ini adalah pola konsumsi masyarakat era post-industrial dengan melakukan pinjaman atau

investasi atau *saving* melalui jasa lembaga keuangan. Permintaan dan penawaran uang akan mempengaruhi jumlah uang beredar diiringi tumbuhnya industri, peningkatan pendapatan, dan pertumbuhan penduduk. Hal ini dipertemukan dalam pasar uang & lembaga keuangan (sirkulasi nomor 2).

Dalam hubungan ini rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak kepada pemerintah dan rumah tangga menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan non balas jasa dari pemerintah (berupa hasil dari pajak), dan retribusi pada pasar barang/jasa yang ada di Kota Sorong. Dapat dilihat pada sirkulasi nomor 3.

Perusahaan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu Perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produknya. Interaksi tersebut dipertemukan dalam pasar barang (sirkulasi nomor 5). Pasar Barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektor riil. Pada penelitian ini, peran Koarmada III turut memberikan dampak peningkatan tumbuhnya industri sektor konstruksi, sektor komoditas, dan sektor konsumen.

Masuknya industri-industri ini akan menghasilkan barang dan jasa yang mencukupi kebutuhan bagi masyarakat Sorong.

Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah (sirkulasi nomor 6) dan perusahaan menjual produk dan jasa kepada pemerintah melalui pasar barang (sirkulasi nomor 5). Melalui kerjasama yang dilakukan antara Pemda Kota Sorong dan industri swasta memiliki hubungan mutualisme dalam hal ini pemerintah daerah sebagai pemilik faktor produksi dan industri sebagai pengguna faktor produksi yang akan memproduksi barang dan jasa di Sorong yang memberi imbal balik.

Pemerintah daerah menerima setoran pajak dan retribusi dari kegiatan konsumsi barang dan jasa dari rumah tangga, digunakan untuk kebutuhan operasional, pembangunan, dan lain-lain untuk membangun daerah (sirkulasi 6). Interaksi antar pelaku ekonomi pemda kota sorong dan masyarakat dalam balas jasa melalui perantara pasar barang dan jasa juga sebagian dari dampak ekonomi yang dihasilkan karena penambahan jumlah penduduk karena adanya penambahan pasukan TNI AL yang setiap tahunnya selalu meningkat. Peningkatan transmigrasi sipil dan militer dalam tempo

yang singkat maupun lama akan meningkatkan permintaan barang dan jasa, artinya terdapat peningkatan konsumsi pada daerah tersebut yang mendorong tumbuhnya berbagai industri.

Pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari perusahaan dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Pelaku ekonomi yang disebut pemerintah dapat diartikan menjadi dua, yaitu Pemda Kota Sorong dan TNI AL, keduanya membuat aturan yang berbeda pada tugas, fungsi, dan pokoknya masing-masing. Pemda Kota Sorong membuat aturan untuk kalangan lokal dan berlaku pada masyarakat Kota Sorong. Sedangkan Koarmada III yang berada di Kota Sorong adalah integral dari Mabes TNI AL sebagai pelaku ekonomi yang tidak membuat aturan dan tidak memiliki otoritas mengatur administrasi pemerintahan untuk masyarakat sipil di Kota Sorong, karena TNI AL memiliki fungsi di bidang pertahanan yang pada hakekatnya pertahanan di atur di tingkat pusat. Dalam siklus kegiatan ekonomi ini, baik pemda dan Koarmada III akan melakukan

konsumsi pembelian barang/jasa melalui industri-industri yang ada di Kota Sorong.

Negara-negara lain (dunia internasional) menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri, dari pasar luar negeri masuk ke dalam pasar barang dalam negeri sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga (sirkulasi nomor 4). Sehingga dari transaksi jual beli tersebut negara lain mendapatkan laba/keuntungan. Dunia internasional akan secara rasional memilih lokasi investasi yang aman dengan potensi sumber daya yang terus tumbuh. Melalui penelitian ini diketahui pihak TNI AL menyadari akan berbagai potensi ekonomi dari sumber daya maritim yang ada di Kota Sorong. Berbagai kegiatan pembinaan masyarakat mulai dari edukasi tentang pemanfaatan lahan dengan mengelola tanaman bahan pangan di atasnya, keterampilan melaut bagi nelayan, dan kegiatan edukasi bagi anak-anak di sekitar wilayah Koarmada III, selalu dilakukan mengingat kedepannya dunia internasional akan terus datang untuk sekedar berwisata atau berbisnis¹⁶. Selain itu, faktor kestabilan kondisi sosial

¹⁶ Keterangan dari Asisten Potensi Maritim Lantamal XIV Kota Sorong

ekonomi juga akan membuka perspektif dunia internasional terhadap kestabilan ekonomi di Kota Sorong. Pemda Kota Sorong mengajui terjadi banyak peningkatan keamanan sejak bertambahnya personel militer di kota Ssorong, ini menguntungkan sebab industri-industri yang ada tidak khawatir terhadap gangguan keamann yang berpotensi merugikan dan mengganggu jalannya kegiatan bisnis mereka hanya karena kondisi masyarakat yang tidak stabil.¹⁷

Dunia internasional (negara lain) mengeksport produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasanya juga melalui pasar negeri lalu masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga dihasilkannya suatu laba (sirkulasi nomor 4 dan 5). Pada masa pembangunan Koarmada III di Kota Sorong akan membuat ini menjadi sebuah peluang bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kota Sorong untuk meningkatkan transaksinya melalui jalur laut, sebab perusahaan yang ada di Kota Sorong menggunakan ekspedisi laut. Dengan adanya TNI AL yang beroperasi mengamankan wilayah laut, saat ini kegiatan perdagangan semakin tumbuh,

sebab swasta merasa terjamin keamanannya saat menggunakan ekspedisi laut dan mengurangi resiko kerugian karena menurunnya tingkat kejahatan laut. Selain itu jalur logistik menjadi pertimbangan, perekonomian di kota sorong juga didukung dengan letak geografis yang strategis untuk jalur pelayaran di wilayah Indonesia bagian timur, sehingga biaya logistik masih cenderung terjangkau untuk perusahaan.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Pertahanan RI sebagai pembuat kebijakan di tingkat nasional, semua agenda pertahanan termasuk di dalamnya pembentukan organisasi militer beserta kebutuhan anggaran harus memiliki kontrol yang baik terhadap pengalokasian dana agar tepat sasaran, dan memastikan perubahan kebijakan yang terjadi tidak merugikan berbagai pihak yang terlibat sebab terkait

¹⁷ Keterangan dari Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Kota Sorong

pendanaan ini berasal dari APBN dan berbagai kerjasama swasta.

Mabes TNI perlu meninjau seluruh aspek termasuk sosial ekonomi sebagai pertimbangan penentuan letak pangkalan, selain itu perlu melakukan koordinasi lebih jauh berupa konsolidasi dan sosialisasi kepada pemerintah daerah tentang pentingnya wilayah pertahanan gunanya untuk menjaga keberlangsungan pangkalan militer agar terhindar dari permasalahan sosial yang bisa saja timbul hanya karena faktor sejarah dan adat seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, serta terhindar dari konflik sosial dan ancaman laten lain seperti yang tersebut dalam renstra Koarmada III. Sedangkan Mabes TNI AL memerlukan kajian dan riset ilmiah tidak hanya dari aspek ancaman, geopolitik dan geostrategis, kajian sosial perlu dilakukan setelah adanya suatu kebijakan yang diterapkan, karena hal ini akan memberi dampak tidak langsung terhadap berbagai perubahan yang terjadi di wilayah tertentu.

Sesuai dengan kajian ekonomi pertahanan yang menyoroti pentingnya dukungan kekuatan ekonomi perlu dibentuk indikator daerah yang siap untuk dijadikan pangkalan dengan skala kekuatan sangat besar milik TNI AL, sebab

perekonomian daerah berpengaruh terhadap upaya pemenuhan standar logistik militer dan sipil. Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai indikator kesiapan daerah oleh Pemda dari tinjauan ekonomi adalah sebagai berikut:

- ketersediaan logistik berupa bahan pangan dan kebutuhan sekunder;
- ketersediaan energi;
- kekuatan ekonomi daerah;
- ketersediaan infrastruktur dengan standar minimal jalan raya utama, fasilitas pelayanan publik, dan perumahan;
- kemampuan finansial daerah dalam mendukung pertahanan, berupa kestabilan ekonomi daerah.

Daftar Pustaka

Buku

- Cohen, Burce dan Orbuch, Terri. 1989. *Introduction to Sociology*. Newyork: McGraw-Hill.
- Mankiew, N. Gregory. 2007. *Makro Ekonomi*. Edisi keenam (Terjemahan). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Parkin, Michael. 2014. *Economics*. Edisi ketujuh. USA: Pearson Education Inc.
- Supriatna, Agus. 2017. *Pertahanan Nasional dalam Perspektif Ekonomi*. Bandung: UNPAD Press.

Supriyatno, Makmur. 2014. *Tentang Ilmu Pertahanan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta., h.43-44

Jurnal / Artikel Ilmiah

Coyle. Lewis. J. 1992. *The Economic Impact of Military Installations on Regional Economies*. Monterey-California: Naval Postgraduate School.

Pocher, Herald. 2013. Defence Economics as Part of The Scientific Works Of Early Economist. *Journal VIII Evfolyam 2. Szam. Junius*.

Peraturan

Undang-undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2012 Tentang Pertahanan Negara.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.12 Th.2018 Tentang Pembentukan Divisi Infanteri 3 Komando Cadangan Strategis TNI AD, Komando Armada III TNI AL, Komando Operasi TNI AU III, dan Pasukan Marinir 3.

Renstra Koarmada III Tahun 2020-2024

Naskah Akademik Tentang Pembentukan Koarmada III

Internet/Website

<https://data.worldbank.org/indicator/> : *Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Yearbook: Armaments, Disarmament and International Security*. (diakses tanggal 13 agustus 2018)

<https://www.lensaPapua.com/pembangunan/> : *Pembangunan Perputaran Ekonomi Kota Sorong Tercepat se-Papua Barat*. (diakses tanggal 10 september 2018)

Sumber Lainnya

Hadi Tjahjanto, Kebijakan TNI dalam Menjaga Keaulatan dan Keutuhan Wilayah NKRI. (Disampaikan pada

kuliah umum tanggal 13 maret 2018).

Ade Supandi, Paparan KASAL pada kuliah umum universitas pertahanan. Peran TNI AL Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Maritim. 15 mei 2018.